



Eksistensi Dan Perkembangan Ilmu Komunikasi,
Sebuah Peluang Dan Tantangan
Santoso S. Hamijoyo

Pendayagunaan Teknologi Komunikasi
Penunjang Pendidikan Nasional
Heri Erlangga

Televisi, Pemirsas Dan Etika Bisnis
Eduard Depari

Media Massa Sebagai Agen Sosialisasi
Rasman Sonjaya

Kemerdekaan Dan Makna Pikiran Yang Membebaskan
Setia Permana

Kampanye Pemilu Komunikasi Politik Dan
Masa Depan Demokrasi Di Indonesia
Deden Ramdan

Efektivitas Komunikasi Politik Masa Pemerintahan
Megawati Soekarno Putri
Ade Priangani

Budaya Sunda Dalam Pentas Internasional
Achmad Solihin

Pers Bisnis; Wujud Komunikasi Tidak Tulus
Ida Hindarsah

PERS BISNIS; WUJUD KOMUNIKASI TIDAK TULUS

oleh Ida Hindarsah

Ida Hindarsah

*Adalah Dosen Fisip Unpas
dan Konsultan Manajemen
di Yayasan Human*

Pers Indonesia memasuki fase baru, yang dalam pertumbuhannya menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan postur pers di masa lalu. Pers pada masa lalu umumnya hanya terdiri dari redaksi, yang hanya menguasai proses produksi berita; mesin cetak milik orang lain, iklan yang tidak banyak, oplah juga sangat terbatas, tetapi pers sekarang berkembang menjadi lembaga yang lengkap: redaksi, percetakan, dan manajemen. Ada iklan yang cukup banyak dan tercapailah oplah di atas 100.000. Penampilan dan tata letak koran dan majalah itupun terkesan modern, penuh warna, dan memberikan kesan ditangani secara lebih profesional.

Berpijak dari postur pers masa lalu itulah yang menyebabkan perkembangan pers Indonesia sekarang disorot, dan sorotan itu

terutama terhadap segi bisnisnya. Sorotan itu masuk akal dan dapat dimengerti, tetapi sekaligus juga tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang pers Indonesia dewasa ini.

Dan pertanyaannya yang sekarang sedang mengemuka adalah: Apakah pers sekarang berkembang sebagai bisnis ataukah berkembang menjadi lembaga kemasyarakatan yang lebih lengkap? Sehingga dalam perkembangan selanjutnya, akan terpenuhilah bagian-bagian yang merupakan kesatuan organis yang fungsional dalam bidang redaksi, percetakan, dan manajemen bisnisnya.

Dalam konteks ini, terjadilah perubahan yang tidak saja dalam iklim sosial-politik, tetapi juga dalam iklim sosial-ekonomi dan sosial-budaya yang berlainan dari periode sebelumnya dan yang mempunyai dampak besar terhadap pertumbuhan pers. Dalam bidang sosial-politik berkembang iklim kebebasan yang lebih besar, bahkan ketika kemudian terjadi pasang surut, fluktuasi kebebasan pers setelah 1966 masih tetap lebih besar dari sebelumnya.

Pada mulanya berkembang situasi konflik yang membawa

ketegangan di mana-mana, taruhlah masalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Tarif Jasa Telepon (TJT) yang efektif berlaku pada bulan Maret 2003 nanti, yang begitu mendadak dan "menyesakkan" masyarakat kita, dan dalam sistem masyarakat apapun, sehingga masyarakat terangsang untuk mencari informasi lewat pers.

Kemudian terjadilah proses lahir dan didebatkannya gagasan-gagasan politik, ekonomi, dan kebudayaan baru; proses yang menyuburkan pertumbuhan pers yang sanggup menangkapnya. Sehingga khalayak ingin memperoleh informasi dan interpretasi tentang peristiwa serta arah kejadian yang lengkap tidak apriori memihak, dan karena itu, memberikan hormat akan penilaian khalayak sendiri. Bagian substansial dari sistem ekonomi pasar ialah persaingan produk, promosi, dan periklanan. Bisnis iklan berkembang, dan mimbar untuk menampung promosi lewat iklan, dan diantaranya melalui surat kabar.

Iklan sebagai bagian dari mekanisme sistem ekonomi pasar bekerja menurut dinamikanya sendiri: yakni promosi akan mempertimbangkan *ratio cost benefit*, dan karena itu juga mempertimbangkan surat kabar mana yang karena kelompok pembacanya dan karena luas penyebarannya dapat menjadi instrumen promosi yang efektif. Perkembangan ekonomi masyarakat

memperluas jumlah penduduk yang sanggup berlangganan surat kabar atau membelinya secara eceran. Sedangkan jumlah peminat membaca didorong oleh sistem sosial budaya, yang semakin memberikan tempat untuk pendidikan anak-anak dan orang dewasa.

Apakah salah, jika pers juga berkembang segi bisnisnya? Pers tidak dibagi-bagikan secara gratis. Surat kabar yang digratiskan akan kehilangan minat pembacanya, karena dianggap kurang bobot kredibilitasnya, juga karena proses produksinya memerlukan biaya yang tidak kecil. Jika akan dirumuskan secara tajam, persoalan yang dihadapi berbunyi sebagai berikut: pers secara ekonomis dapat berdiri sendiri dan membiayai diri sendiri merupakan keharusan, termasuk keharusan agar dapat menjalankan tugas-tugas idealnya. Pada waktu yang bersamaan, kemampuan ekonomi pers itu sendiri dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga berpotensi menghimpit peranan idealnya.

Dalam masyarakat tidak tulus, yang artinya tidak memaksudkan serta tidak pula mengatakannya apa yang sebenarnya, apa yang hidup dalam pikiran dan hatinya, komunikasi sekedar basa basi dan komunikasi tidak menyampaikan pesan yang sebenarnya, gradasi perihal tidak tulus tidaklah bertingkat-tingkat dan bervariasi, misalnya karena memang tidak memahami

persoalan, tidak tahu duduknya perkara, tidak sama latar belakangnya baik latar belakang pemahaman dan pengalaman maupun latar belakang referensinya.

Dengan kata lain, jika dalam kenyataannya dan menurut pengalaman kita masing-masing, terjadi ketidaktuluan dalam berkomunikasi, itulah hal yang masuk akal, tidak aneh, dan tidak boleh mengecilkan hati kita untuk tidak melakukan komunikasi. Orang bilang, komunikasi merupakan pembawaan mahluk sosial dan masyarakat manusia. Dewasa ini, ketika orang sedang memasuki milenium baru, berkomunikasi kembali menjadi salah satu agenda sentral peradaban manusia. Di mana-mana orang berbicara tentang hebatnya teknologi informasi baru.

Rakyat yang hakekatnya adalah institusi pemegang kedaulatan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu, dalam kenyataan prosesualnya cenderung hanya dijadikan obyek elit pemegang mandat kekuasaan atau oposisinya saja. Betapa tidak, selama republik ini berusia 57 tahun lebih, kendati kita sedang memasuki era reformasi nasib rakyat kebanyakan belum bergeming alias tidak berubah.

Dimasa lalu, nasibnya dijadikan dalih untuk membuat proposal pinjaman ke negara-negara donor atau bank dunia dan lembaga-lembaga keuangan non

bank di mancanegara. Biasanya, program pembangunan yang dalam pelaksanaannya tersentralistis, mengundang paradigma pemerintahan kolonial dalam melayani hajat hidup rakyat. Hanya yang menguntungkan kecek oknum birokrasi saja yang dilayani dengan layak, sementara rakyat yang berkecek tipis harus antri untuk mendapat pelayanan dari pemerintah, yang dalam proses komunikasi, bisa terjadi hambatan-hambatan yang secara teknis disebut distorsi. Munculnya distorsi bisa berasal dari sang komunikator, bisa juga dari komunikan, gangguan pada medium atau perangkat komunikasi juga menyebabkan distorsi.

Kondisi struktural ini, baik dimasa pemerintahan kolonial maupun pemerintahan pasca kemerdekaan, terakhir rejim orde baru, termasuk pemerintahan sekarang dalam melayani hajat hidup orang banyak, khususnya dalam kapasitas sebagai komunikator, belum total mencitrakan diri dan jatid dirinya sebagai pelayan publik. Dengan kata lain, masih memperlihatkan arogansi kekuasaan.

Padahal kita maklumi pemerintahannya itu tidak lagi kredibel, karena legitimasi rakyat berdaulat masih menjadi polemik diantara komponen elit bangsa. Apalagi dikaitkan dengan tuntutan aspirasi rakyat yang menginginkan reformasi total terhadap seluruh tatanan kenegaraan, kita masih berharap-harap cemas untuk

mendapat buktinya, apakah dalam proses pergolakan politik yang akan datang nanti partai yang gencar mengatasnamakan *rakyat kecil* atau yang masih bangga dengan *status quonya* bakal merebut hati rakyat sebagai pemilih?

Realitasnya, rakyat kita masih harus menanggung nasib diperintah oleh elit politik yang masih menggunakan paradigma pemerintahan kolonial dalam kemasan baru, walaupun ia sanggup membangun fisik negeri ini, tapi ia akan membungkam daya kreativitas dan suara nurani rakyat. Malah, pemerintahannya cenderung fasis. Rakyat akan dininabobokan lagi oleh ritual gunting pita peresmian berbagai proyek yang dilaksanakan oleh keluarga maupun kroni penguasa.

Untuk membangun Indonesia Baru yang dilandasi kehidupan masyarakat madaniah yang penuh cinta kasih. Kendati begitu, dalam prosesnya harus dihitung berbagai kelemahan, baik yang bersifat struktural kultural maupun psikologis, tanpa itu kita bakal terjebak kembali oleh perilaku budaya politik paradigma pemerintahan kolonial.

Persoalan mendasar yang masih kita hadapi saat ini, tidak terlepas dari rangkaian perilaku budaya politik masa lalu yang erat dengan budaya feodal kolonialistik. Dan reaksinya, muncul ke permukaan setelah rakyat di berbagai daerah memiliki kembali keberaniannya untuk memperjuangkan hak-hak daulat

kerakyatannya.

Paling tidak, mereka itu menggugat pemerintah pusat untuk melakukan penataan terhadap pembagian sumberdaya produktif yang dimiliki daerahnya. Mereka ingin pembagian yang proporsional, dengan tekanan sumberdaya alam yang dimilikinya itu mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Sebab, selama ini mereka merasakan sumberdaya alam yang potensial yang dikelola sentralistik hanya mengenyangkan orang-orang pusat saja. Sementara rakyat di daerahnya tetap melarat dan hanya menjadi korban pencemaran limbah yang dihasilkan industri raksasa yang mengeksploitasi sumberdaya alamnya. Keadaan ini, mengundang kesan mendalam bagi rakyat lokal, mereka merasa menjadi negeri jajahan.

Akibatnya lebih jauh, kita dihadapkan pada persoalan disintegrasi bangsa yang akan menguras tenaga, pikiran dan dana yang tidak sedikit. Bahkan, kita juga akan dihadapkan kepada masalah yang menyangkut nyawa manusia.

Menghadapi soal ini, apakah resep lewat adanya Undang Undang baru ataupun Peraturan lain yang mendukung, yang terkadang masih dianggap kontroversial dan ditanggapi cerdas oleh masyarakat, dengan kesimpulan isinya hanya sekedar cek kosong belaka masih bisa diandalkan atau hanya sebagai asesoris saja, yang bisa dikatakan

ketika para pimpinan partai berkampanye di daerah potensinya, dengan menyuarakan kata-kata manis dan berbau angin surga saja, yang pada kenyataannya masih merupakan "lips service" saja

Secara psikologis kultural, persoalan inti yang harus kita hadapi menyangkut perilaku budaya politik elit kita, baik yang sudah berpengalaman dalam rejim lama maupun yang baru lahir. Mereka masih terperdaya oleh eforia politik lewat retorika kesadaran verbal. Dan kita rasakan, saling hujat dan kesumat mewarnai dinamika politiknya. Rakyat yang tidak berdosa lagi-lagi yang menjadi korban.

Keadaan ini memancing berbagai spekulasi yang keluar dari jalur neraca akal sehat. Taruh misal, menghadapi masa pergolakan politik, rakyat mulai gelisah menanggulangi kebutuhan pokoknya. Sebab, isu yang diterimanya sangat mengguncangkan naluri manusiawinya. Konon, semua komponen masyarakat akan melakukan aksi demonya, ketika harga dasar tarif listrik, BBM, dan tarif telepon naik, karena mereka ketakutan dengan kondisi ekonomi kita yang semakin ruwet ini, belum lagi dampak dari pasca tragedi kemanusiaan yang terjadi sebelumnya, akan menambah bobot begitu besarnya beban yang harus dirasakan oleh bangsa ini.

Bukan hanya itu, disebabkan masyarakat kita yang diantaranya masih menganut faham religi

sinkretik itu, terperdaya oleh berbagai ramalan orang pintar, yang ahli super natural dan para sesepuhnya, yang menyatakan, konon nantinya akan terjadi permasalahan yang maha akut di negeri khatulistiwa ini, apabila segala persoalan yang terjadi tidak segera dapat diselesaikan dengan baik oleh para petinggi bangsa ini.

Realitas psiko politik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita menjelang perhelatan politik ini, tentunya akan dijadikan momentum dasar dalam proses pergulatan nilai yang dapat menjadikan kontra produktif dengan segala harapan kita akan terselenggaranya pemerintahan yang jujur adil. Ditambah dengan aksi teror dan terorisme yang telah menjadi bagian dari wacana kehidupan politik negeri kita ini, yang kian hari semakin begitu terasa nuansanya pada kehidupan sosial budaya kita.

Sementara aparat keamanan yang seharusnya menjadi pelindung negara, seolah-olah tidak bertenaga dalam menghadapi problematika ini, belum tuntas persoalan yang baru, datang lagi masalah-masalah yang menghimpit lainnya, sementara para petingginya hanya bisa berdalih, yang kadang tanpa solusi untuk bisa menuntaskan kasus-kasus yang terjadi selama ini.

Sebab, membangun wacana budaya dalam masyarakat yang masih bersikap reaktif emosional, peran pers sebagai penyambung lidah rakyat sangat menentukan.

Jika pers itu mampu mencitrakan diri dan jati dirinya, diharapkan masyarakat pun akan terpengaruh untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan, dan yang kita perlukan adalah pers yang bisa memcerankan unsur idealistis dan realistik dalam mengaplikasikan setiap program kerjanya, sehingga segala bentuk harapan dan kenyataan kita akan terwujud dengan sendirinya, karena berkomunikasi dalam masyarakat tidak tulus akan tidak sempurna rasanya.

Daftar Bacaan

Eduard C. Smith, *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*, Grafiti Pers, Jakarta, 1983.

Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

Tim Lipi, *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*, Mizan, Bandung, 2001.

Jakob Octama, *Pers Indonesia Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.

Daftar Pustaka:

Al Chaidar, *Reformasi Prematur*, Pustaka Darul Falah, 1998, Jakarta.

Gumelar, Agum, *Pluralisme Budaya Bangsa Merupakan Modal Terwujudnya Masyarakat Madani*, Saresehan

Pemuda dan Temu Konsultasi Kader Bela Negara, 1999, Bandung.

Sanusi, Shalahuddin, KH, *Integrasi Ummat Islam*, Orba Shakti, 1987, Bandung.

Stanley, Fischer, *Peranan IMF Saat Krisis*, Kompas 9 Mei 1998, Gramedia, 1998, Jakarta.

Akhmadi, Heri, *Peta Bumi Partai Politik : Koalisi atau Status Quo*, Policy Analysis No. 21, 2 Maret 1999, IPA, Institute of Public Affairs, 1999, Jakarta.

Sagir, Soeharsono, *Upaya Penyehatan Perbankan Nasional*, Diskusi Terbatas Staf Pengajar, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1999, Bandung.